

DAFTAR BACAAN

a. Peraturan Perundang-undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kapolri dan ketua Bawaslu RI Nomor: 055/A/JA/VI/2008, No. Pol: B/06/VI/2008, Nomor: 01/Bawaslu?KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakkan hukum terpadu (GAKKUMDU) dan pola penanganan perkara tindak pidana pemilu legislatif tahun 2009.

Putusan Perkara DKPP Nomor 87-PKEDKPP/V/2019.

b. Buku:

Dedi Mulyadi, 2012, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi, Gramata Publising, Jakarta.

A. Gaffar, 2006, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

H. Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Terjemahan dari General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung.

Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban Tahun 2019.

Mohammad Faisal Riza dan Ruhermansyah, 2019, *Pelanggaran Administrasi Bawaslu Pasca Rekapitulasi dan Putusan MK: Konsekuensi dan Problematikanya*, Bawaslu, Jakarta.

Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008.

Sri Sugeng Pujiatmiko, 2020, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Karya Literasi Indonesia, Tuban.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.

Topo Santoso, 2006, *Penegakkan Hukum Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

c. Jurnal:

S.A. Basuki, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga (Studi Tentang Kebijakan Formulasi dan Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2 Mei 2010, h. 131-132.

d. Website:

Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia*, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> (di akses pada 15 Januari 2020).

<https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/> diakses 22 Juli 2024 pukul 10:30 WIB.

<https://pemilu.tempo.co/read/1796917/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-menurut-uu-pemilu>, diakses 20 Juli 2024 pukul 17:00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-bawaslu-untuk-menangani-pelanggaran-dan-sengketa-pemilu-lt657996945574e/> diakses 20 Juli 2024 pukul 17:05 WIB.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5513769/10-contoh-pelanggaran-pemilu-pahami-juga-pengertian-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=5>